

STRATEGI REVITALISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LEUNGAH DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI SEULIMEUM BERBASIS AGROINDUSTRI KEMIRI MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN MITIGASI RISIKO HIDROMETEOROLOGI

*Revitalization Strategy For Leungah Transmigration Settlement Units And
Development Of The Seulimeum Transmigration Area Based On Kemiri
Agroindustry Through Water Resource Management And Hydrometeorological
Risk Mitigation*

**Maulidella¹⁾, Amira Layyina²⁾, Rafi Mubarak Al Barik³⁾, Salsabila Prastina⁴⁾, Adi Setyo
Purnomo⁵⁾**

¹Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ubudiyah Indonesia

²Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

³Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

⁴Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

⁵Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Email Corresponding author: maulidella@uui.ac.id

Abstrak

Kawasan Transmigrasi Seulimeum di Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi pertanian dan perkebunan lahan kering yang signifikan, namun belum berkembang optimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses air bersih, serta lemahnya penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan melakukan evaluasi partisipatif kawasan serta menyusun rekomendasi strategis revitalisasi berbasis potensi lokal, khususnya agroindustri kemiri. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap 18 informan kunci, serta Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 32 peserta dari unsur pemerintah gampong, kelompok tani, dan pemangku kepentingan daerah. Analisis dilakukan melalui SWOT, pemetaan pemangku kepentingan, dan kajian kesesuaian lahan. Hasil menunjukkan bahwa kemiri, kelapa dalam, dan pinang memiliki tingkat kesesuaian lahan tinggi, namun pengembangannya terkendala akses jalan usaha tani, ketersediaan air, dan rendahnya konektivitas pasar. Kegiatan menghasilkan model revitalisasi kawasan berbasis infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan ekonomi, serta mitigasi risiko hidrometeorologi yang dapat direplikasi pada kawasan transmigrasi serupa.

Kata Kunci: transmigrasi, agroindustri kemiri, evaluasi partisipatif, pengelolaan air, revitalisasi kawasan

Abstract

The Seulimeum Transmigration Area in Aceh Besar Regency has significant potential for dryland agriculture and plantation development but remains underdeveloped due to limited infrastructure, inadequate water access, and weak local economic institutions. This community service program aimed to conduct a participatory evaluation and formulate a strategic revitalization model based on local potential, particularly candlenut agroindustry. Methods included field observation, in-depth interviews with 18 key informants, and Focus Group Discussions (FGDs) involving 32 stakeholders. SWOT analysis, stakeholder mapping, and land suitability assessment were applied. Findings indicate that candlenut, coconut, and areca nut possess high land suitability; however, development is constrained by poor farm road access, limited water supply, and weak market connectivity. The program produced a replicable revitalization model integrating infrastructure improvement, institutional strengthening, and hydrometeorological risk mitigation.

Keywords: transmigration, candlenut agroindustry, participatory evaluation, water management, regional revitalization

1. PENDAHULUAN

Program transmigrasi di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma dari pendekatan relokasi penduduk menjadi strategi pengembangan kawasan berbasis potensi lokal

dan penguatan ekonomi wilayah. Kebijakan terbaru menekankan integrasi tata ruang, pengembangan komoditas unggulan, dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia kini diarahkan tidak hanya sebagai program relokasi penduduk, melainkan sebagai upaya strategis untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal. Dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045, Kementerian Transmigrasi menginisiasi program Transmigrasi Patriot, yang salah satu komponennya adalah pembentukan Tim Ekspedisi Patriot (TEP). TEP merupakan tim multidisiplin yang melibatkan akademisi, mahasiswa, peneliti, dan praktisi dari perguruan tinggi mitra untuk melakukan riset, pemetaan potensi kawasan, dan pemberdayaan masyarakat transmigran.

Program ini dilandasi oleh kebutuhan akan data dan kajian berbasis riset yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan transmigrasi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Tim Ekspedisi Patriot diharapkan menjadi katalis dalam pengembangan ekosistem ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyusunan *roadmap* pembangunan kawasan transmigrasi berbasis komoditas unggulan. Transmigrasi merupakan program pembangunan nasional yang telah berlangsung lama di Indonesia. Setelah kemerdekaan, program ini dilanjutkan dengan tujuan pemerataan penduduk dari Jawa dan Bali yang padat ke pulau-pulau luar yang lebih jarang penduduknya, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pada era Orde Baru, khususnya setelah tahun 1974, transmigrasi dilakukan secara masif sebagai peluang besar untuk membangun daerah dan membuka lahan pertanian baru. Pada beberapa dekade terakhir, tujuan transmigrasi telah mengalami reorientasi signifikan. Program ini tidak lagi semata-mata berfokus pada pemindahan penduduk yang dapat menimbulkan konflik sosial dan deforestasi. Sebaliknya, transmigrasi kini diposisikan sebagai strategi untuk membangun produktivitas bersama rakyat dan pemerataan kesempatan ekonomi, sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan penguatan daerah dari pinggiran. Pergeseran tujuan ini mencerminkan pengakuan bahwa pendekatan sebelumnya tidak lagi memadai untuk tantangan pembangunan kontemporer.

Perubahan ini juga tercermin dalam kebijakan pemerintah yang lebih baru, seperti penetapan konsep “Transpolitan” dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024, yang mendorong pertumbuhan wilayah baru atau yang sudah ada melalui satuan pengembangan terintegrasi berbasis pertanian maupun nonpertanian, dengan fokus pada kolaborasi lintas sektor dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan adanya kalibrasi ulang kebijakan yang mendalam menuju perencanaan regional yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan maju secara teknologi, melampaui sekadar tujuan demografis. Perubahan paradigma ini menjadi dasar krusial mengapa desain pengembangan komoditas unggulan yang canggih dan spesifik menjadi sangat penting saat ini.

Berbeda dengan pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi sebelumnya yang bersifat *top-down*, kegiatan ini menggunakan model evaluasi partisipatif berbasis pemetaan pemangku kepentingan dan analisis spasial terpadu. Program transmigrasi di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam Pembangunan nasional, terutama dalam upaya pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah. Kawasan transmigrasi dirancang tidak hanya sebagai pemukiman baru, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Salah satu pendekatan strategis yang dapat diterapkan adalah desain pengembangan komoditas unggulan spesifik wilayah, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi transmigran serta meningkatkan produktivitas kawasan. Pemilihan dan pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan karakteristik agroekologi dan sosial-budaya setempat menjadi hal krusial. Komoditas yang dikembangkan harus memiliki daya saing tinggi, bernilai ekonomi, dan sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia di kawasan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi lokal yang berkelanjutan, memperkuat keterkaitan hulu-hilir, serta mempercepat integrasi kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitarnya (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Namun, dalam praktiknya, pengembangan komoditas unggulan di Kawasan transmigrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kurangnya pemetaan potensi secara partisipatif, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta lemahnya jejaring pasar dan dukungan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, diperlukan suatu desain pengembangan komoditas yang tidak hanya bersifat

teknokratis, tetapi juga berbasis data lokal, partisipatif, dan integratif, guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program transmigrasi dalam jangka panjang (Bappenas, 2021).

2. METODE

2.1 Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan TEP ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengumpulan data secara primer dan sekunder. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview/IDI*) dan Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*).

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah salah satu dari banyak Teknik penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengalaman subjektif peserta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendetail yang memberikan pencerahan tentang perspektif individu dan makna yang dipersepsikan tentang topik, isu, atau proses tertentu (Rutledge & Hogg, 2020). *In-depth interview* mirip dengan percakapan sehari-hari, tetapi dirancang untuk menggali lebih dalam perspektif narasumber. *In-depth interview* berbeda dengan *structured survey*, dimana peneliti menggunakan sebagian besar pertanyaan dengan respon tetap (misalnya, ya atau tidak, pilihan ganda, pertanyaan skala Likert). Banyak peneliti melihat *in-depth interview* mendalam sebagai percakapan yang diarahkan.

Peneliti mempersilahkan responden responden menyampaikan pandangan mereka berdasarkan padanan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Conrad, 2001). Keuntungan utama dari *in-depth interview* adalah responden dapat memberikan informasi yang jauh lebih detail dibandingkan dengan apa yang tersedia melalui metode pengumpulan data lainnya, seperti survei (Boyce & Neale, 2006). Osborne & Grant-Smith (2021) menyatakan bahwa *in-depth interview* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *semi-structured interview* dan *unstructured interview*. *Semi-structured interview* merupakan bentuk wawancara tetapi dengan cara yang sadar diri, teratur, dan sebagian terstruktur. Struktur ini diberikan melalui penggunaan jadwal wawancara atau panduan, yang dapat berisi campuran pertanyaan yang telah disiapkan dan tema untuk diskusi. *Unstructured interview* lebih bebas dan tidak ada batasan yang sebelumnya telah ditentukan sebelum melakukan wawancara. Dalam kajian ini jenis *in-depth interview* yang

lebih tepat digunakan adalah jenis *semi-structured interview*.

Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*) merupakan metode pengumpulan data secara kualitatif yang banyak digunakan dalam lingkup penelitian ilmu pengetahuan sosial, manajemen, pendidikan hingga kesehatan (Gundumugola, 2020). *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan bentuk pengembangan dari metode wawancara dengan lebih memperdalam wawancara mengenai topik spesifik tertentu dalam format diskusi (Gundumugola, 2020). Menurut Odimegwu (2000), FGD dilakukan melalui diskusi atau wawancara terstruktur dengan kelompok kecil untuk menggali informasi mendalam mengenai topik spesifik tertentu. Peserta FGD haruslah individu terpilih yang memiliki pengetahuan mengenai topik atau masalah terkait yang dapat menyumbangkan informasi mengenai topik penelitian untuk memperkaya data yang dibutuhkan (Collins & O'Brien, 2003).

Penyelenggaraan FGD setidaknya harus terdiri dari minimal tiga hingga 12 peserta (Krueger, 1994). Terdapat berbagai pendapat mengenai ukuran ideal mengenai jumlah peserta FGD, antara lain menyebutkannya empat sampai lima (Twinn, 1998), enam sampai 12 peserta (Prince & Davies, 2001), dari 6 sampai 8 peserta (Leitao & Vergueiro, 2000). Dalam menyelenggarakan FGD, seorang peneliti harus hadir dalam diskusi sebagai fasilitator atau moderator yang berpartisipasi aktif dalam mengarahkan proses diskusi (Kitzinger and Barbour, 1999). Baru-baru ini, FGD *online* dengan memanfaatkan *platform internet* (*zoom meeting*, *google meeting*, dan lain-lain) telah muncul untuk menggantikan FGD secara tatap muka, sekaligus sebagai pendekatan baru dalam rangka memperluas partisipan yang barangkali tidak terjangkau secara jarak (Fox et al., 2007) yang mana moderator dan peserta harus dapat melihat dan mendengar satu sama lain dengan bantuan *webcam* dan mikrofon (Gundumugola, 2020).

Pengumpulan data sekunder pada studi ini dilakukan melalui studi literatur atau *desk study*. Studi literatur merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui pencarian data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian (Syaibani, 2010). Informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku, makalah, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan-peraturan, dan berbagai sumber literatur tertulis lainnya baik tercetak ataupun elektronik (Arikunto, 2010). Studi literatur yang dilakukan dari

berbagai penelitian sebelumnya bermanfaat untuk memperkaya pemahaman, mengenali permasalahan, dan memperoleh data terkait yang relevan dengan topik penelitian (Leedy, 1997).

Doolan & Froelicher (2009) menyampaikan bahwa pengumpulan data sekunder melalui data eksisting yang sudah ada merupakan cara yang efisien untuk menjawab pertanyaan penelitian baru, dengan disertai pencermatan pada kesesuaian dan kualitas data yang diperoleh. Tahapan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur ini meliputi pemindaian pustaka (*scanning literature*) untuk mengidentifikasi berbagai referensi yang memungkinkan untuk disertakan melalui proses pembacaan cepat (*skimming*), kemudian memetakannya (*mapping*) untuk mengatur hasil *skimming* dalam rangka menyatukan topik cerita, membangun ide inti, serta melakukan referensi silang sehingga dapat melanjutkannya pada tahap analisis data, dan ditutup dengan tahap pengorganisasian referensi (Machi & McEvoy, 2016).

2.2 Koordinasi Lintas Pihak dan Stakeholder

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan Tim Ekspedisi Patriot di lapangan, koordinasi lintas pihak dan keterlibatan *stakeholder* menjadi aspek krusial dalam seluruh tahapan pelaksanaan program. Koordinasi dilakukan secara sistematis dengan berbagai pihak yang memiliki peran strategis, baik di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas lokal. Tim Ekspedisi Patriot harus membangun kolaborasi efektif dengan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme berikut:

2.2.1 Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

- 1) Pemetaan bersama potensi daerah
- 2) Integrasi dengan program pembangunan daerah
- 3) Pemanfaatan data dan sumber daya daerah
- 4) Akses data perencanaan wilayah, RTRW, RPJMD, serta rencana sektoral yang relevan dengan analisis kawasan.
- 5) Fasilitasi pertemuan dengan camat, geuchik, dan perangkat desa untuk verifikasi kondisi lapangan.
- 6) Dukungan teknis dalam identifikasi lokasi prioritas, validasi temuan, dan penyelarasan rekomendasi dengan kebijakan daerah.
- 7) Koordinasi keamanan, logistik mobilitas, dan akses ke lokasi terpencil.

2.2.2 Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

- 1) Penempatan peneliti di lokasi transmigrasi
- 2) Pelibatan dosen sebagai supervisor riset
- 3) Akses laboratorium, perpustakaan, dan pusat data universitas untuk mendukung analisis lanjutan.

2.2.3 Pelibatan Masyarakat Lokal

- 1) Konsultasi rutin untuk memahami konteks lokal.
- 2) Mengajak warga terlibat sebagai informan utama, pemandu lapangan, dan penyedia pengetahuan lokal.
- 3) Memberikan ruang mereka menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan prioritas sehingga rekomendasi program relevan dan bisa diterima.
- 4) Melibatkan kelompok tani, pemuda, dan perempuan dalam survei, pemetaan partisipatif, atau validasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Umum Kawasan

Evaluasi kondisi umum kawasan mendapati sejumlah temuan terkait potensi dan permasalahan kawasan dari aspek fisik dasar, kondisi sarana dan prasarana, demografi, serta riwayat perkembangan kawasan transmigrasi. Secara garis besar, beberapa temuan utama adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis kondisi fisik wilayah dan karakteristik lahan, Kawasan Transmigrasi Seulimeum didominasi oleh lahan kering dengan variasi kelerengan yang cukup besar. Kondisi ini memberikan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan lahan kering, namun dengan keterbatasan berupa risiko erosi, longsor, serta tingginya biaya pembangunan fisik, sehingga pengembangan kawasan memerlukan pengelolaan lahan dan konservasi yang bersyarat.

Dari sisi sarana dasar, kondisi pelayanan masih menunjukkan ketimpangan antar gampong dalam satu kawasan transmigrasi, khususnya pada layanan pendidikan dan kesehatan. Sarana kesehatan tersedia secara terbatas dan belum berfungsi optimal, baik dari sisi jangkauan pelayanan, kelengkapan fasilitas, maupun pemerataan tenaga kesehatan, sehingga belum mampu melayani seluruh wilayah permukiman secara memadai.

Dari aspek prasarana, hambatan utama pengembangan kawasan dan aktivitas ekonomi masyarakat berasal dari keterbatasan dan kualitas prasarana dasar, terutama jaringan jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih.

Jaringan jalan lingkungan dan penghubung menuju kawasan transmigrasi banyak mengalami kerusakan, khususnya pada ruas

jalan tanah dan jalan kebun, sehingga menghambat mobilitas penduduk dan distribusi hasil produksi.

Jaringan jalan usaha tani belum berkembang secara memadai, menyebabkan kesulitan masyarakat dalam mengelola lahan dan mengangkut hasil panen.

Jaringan listrik telah menjangkau sebagian besar wilayah, namun kualitas layanan masih rendah dengan gangguan pasokan yang cukup sering terjadi.

Jaringan telekomunikasi masih ditandai oleh banyaknya lokasi blank spot, yang membatasi akses informasi, komunikasi, serta konektivitas masyarakat dengan wilayah lain.

Layanan air bersih menghadapi keterbatasan sumber dan debit, terutama pada musim kemarau, serta belum didukung oleh sistem pengelolaan dan distribusi yang memadai.

Dari sisi demografi dan riwayat kawasan, komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif yang berpotensi menjadi modal penggerak ekonomi kawasan. Namun demikian, berdasarkan riwayat penempatan dan perkembangan kawasan transmigrasi, UPT Leungah mengalami penurunan tingkat hunian yang ditandai dengan banyaknya rumah tidak ditempati dan lahan usaha yang tidak lagi dikelola secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengembangan kawasan transmigrasi belum berjalan optimal dan berpotensi menghambat fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

3.2 Kondisi Sosial dan Kelembagaan

Kondisi sosial dan kelembagaan di wilayah transmigrasi Leungah ditandai oleh karakter masyarakat agraris yang relatif solid dan partisipatif, dengan pola kehidupan yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan lahan kering. Kelembagaan desa dan kelompok tani telah terbentuk dan berjalan, namun kapasitasnya masih terbatas akibat keterbatasan infrastruktur, akses layanan, serta dukungan kelembagaan formal. Secara garis besar, temuan pada aspek sosial dan kelembagaan di wilayah transmigrasi Leungah, ditandai oleh masyarakat agraris yang relatif solid dan partisipatif dengan kelembagaan desa dan kelompok tani yang telah berjalan, namun masih terbatas kapasitasnya akibat keterbatasan infrastruktur, akses layanan, dan dukungan kelembagaan formal.

3.3 Kondisi Ekonomi Kawasan

Kondisi ekonomi masyarakat di kawasan studi masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Keenam komoditas tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi, apabila didukung dengan peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta penguatan kelembagaan usaha masyarakat

3.4 Kondisi Ekologi dan Layanan Dasar

Sumber daya alam di wilayah transmigrasi Leungah didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan yang cukup potensial untuk pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura, namun pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan pengelolaan. Dari segi jaringan jalan, setiap gampong memiliki jalan menuju Perkebunan dengan kondisi rusak yang dapat menghambat proses distribusi. Dimana jalan tersebut berupa makadam yang berbatu dan berdebu. Selain itu cakupan sarana kesehatan di lokasi studi juga tidak mencukupi Masyarakat yang ada, Masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Lamteuba.

3.5 Temuan Kunci dan Isu Strategis Lapangan

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi umum kawasan, kondisi sosial dan kelembagaan, kondisi ekonomi kawasan, serta kondisi ekologi dan layanan dasar, teridentifikasi sejumlah temuan kunci yang selanjutnya dirumuskan menjadi isu strategis pengembangan Kawasan Transmigrasi Seulimeum, khususnya UPT Leungah. Isu-isu strategis ini dipandang krusial karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan kawasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran dan wilayah sekitarnya. Adapun isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Revitalisasi UPT Transmigrasi Leungah dan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kawasan Transmigrasi
2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Sentra Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah
3. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi

4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Keterlibatan Langsung Dalam Kegiatan Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian

3.6 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan temuan dan isu strategis yang telah diidentifikasi, rekomendasi strategis pengembangan Kawasan Transmigrasi Seulimeum diarahkan pada upaya revitalisasi kawasan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara garis besar, rekomendasi yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penataan ulang dan revitalisasi kawasan transmigrasi, khususnya UPT Leungah, sebagai kawasan permukiman yang layak huni dan terintegrasi dengan gampong-gampong sekitarnya.
2. Meningkatkan dan memperbaiki sarana prasarana dasar, terutama jaringan jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, sebagai prasyarat utama keberlanjutan kawasan.
3. Mendorong penguatan ekonomi kawasan melalui pengembangan klaster agroindustri berbasis komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian, serta pengembangan hilirisasi dan rantai nilai.
4. Memperkuat kelembagaan lokal dan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan.
5. Mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam seluruh tahapan pengembangan kawasan transmigrasi.

3.7 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Pusat, Daerah, dan Mitra

Pengembangan kawasan transmigrasi Leungah memerlukan landasan rekomendasi strategis yang mampu menjembatani kondisi eksisting dengan visi kawasan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menekankan pemanfaatan potensi lokal, tetapi juga perbaikan struktur tata kelola, penguatan kelembagaan, serta penataan ruang yang mendukung keterhubungan antar Gampong dalam Mukim Lampanah. Dalam konteks ini, rekomendasi strategis disusun untuk menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan yang selama ini menyebabkan kawasan transmigrasi tertinggal dibandingkan wilayah lain.

Rangkaian intervensi disusun berjenjang mulai dari jangka pendek hingga menengah–panjang, dengan menempatkan peningkatan produktivitas, partisipasi masyarakat, dan perbaikan layanan dasar sebagai titik awal. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada upaya-upaya yang cepat dirasakan manfaatnya oleh warga, seperti perbaikan sarana irigasi dan jalan produksi, peningkatan akses terhadap pasar hasil pertanian dan kehutanan, serta pelatihan kewirausahaan dan penguatan kapasitas kelompok tani maupun BUMG. Tahap berikutnya menitikberatkan pada penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan, konservasi lingkungan, serta penciptaan mekanisme koordinasi antar lembaga yang lebih efektif dan akuntabel.

Sebagai dasar desain tata kelola kolaboratif, rekomendasi strategis menekankan pentingnya integrasi peran antara lembaga formal seperti pemerintah gampong dan BUMG dengan lembaga adat dan tokoh lokal yang selama ini berfungsi sebagai penjaga norma dan penghubung sosial. Integrasi ini diwujudkan melalui perencanaan bersama, pelaksanaan program terpadu, serta mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan kelompok masyarakat, khususnya pemuda dan perempuan. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memperkuat legitimasi, rasa memiliki, dan keberlangsungan pengelolaan kawasan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, rekomendasi strategis pengembangan kawasan transmigrasi Leungah diarahkan untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis potensi lokal, penguatan kelembagaan, penetapan intervensi prioritas yang sistematis, dan tata kelola kolaboratif yang sensitif terhadap struktur serta pola ruang kawasan. Pendekatan ini menjadi kerangka untuk merancang program yang efisien dan adaptif, memastikan pemanfaatan lahan yang lebih efektif, distribusi fungsi kawasan yang jelas, serta konektivitas antar zona yang mampu menopang keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan kerangka tersebut, kawasan transmigrasi diharapkan tidak lagi dipandang sebagai ruang pinggir, melainkan sebagai simpul pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan arah pembangunan wilayah Aceh Besar.

3.8 Peluang Replikasi dan Kolaborasi Lanjutan

Kondisi Kawasan Transmigrasi Seulimeum, khususnya UPT Leungah, memberi pelajaran penting untuk replikasi, terutama terkait alasan masyarakat tidak menempati kawasan transmigrasi. Temuan utama menunjukkan bahwa keterbatasan akses seperti jalan kebun yang belum layak, konektivitas gampong induk yang terbatas, dan jarak ke layanan dasar menjadi faktor yang membuat kawasan transmigrasi kurang diminati. Kondisi ini membuat warga sulit mengelola lahan, mengangkut hasil panen, atau sekadar mobilitas harian. Kasus ini menjadi indikator bahwa keberhasilan transmigrasi tidak hanya ditentukan oleh komoditas atau potensi lahan, tetapi juga oleh infrastruktur dasar yang memungkinkan kawasan tersebut benar-benar dihuni.

Untuk replikasi, elemen ini menjadi acuan kunci. Jalan kebun, jalan penghubung ke permukiman, dan akses ke sumber air harus ditempatkan sebagai prioritas awal sebelum intervensi lain. Dengan akses transportasi yang memadai, produktivitas kebun meningkat, biaya logistik turun, dan warga punya alasan untuk tinggal serta mengembangkan usahanya. Replikasi ke gampong lain sebaiknya menggunakan pendekatan berurutan: buka akses terlebih dulu, pastikan konektivitas air, baru masuk pada penguatan komoditas dan fasilitas pengolahan.

Kolaborasi lanjutan dapat diarahkan pada identifikasi penyebab ketidakterhunan di kawasan transmigrasi lain, pemetaan bottleneck infrastruktur, serta pengembangan standar teknis pembangunan jalan usaha tani dan jaringan akses dasar. Pemerintah daerah bisa mendukung percepatan pembangunan akses, perguruan tinggi dapat memetakan pola mobilitas dan kebutuhan masyarakat, mitra pembangunan dapat terlibat dalam pilot perbaikan infrastruktur, dan sektor swasta berperan dalam memastikan rantai pasok kemiri berjalan setelah akses terbuka.

Dengan menjadikan kasus Seulimeum sebagai referensi, model replikasi yang muncul lebih realistis: membangun kawasan transmigrasi harus diawali dari infrastruktur dasar yang membuat kawasan itu layak huni, bisa diakses, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi sejak hari pertama.

Sementara itu model pengembangan kawasan di Seulimeum dapat direplikasi ke lokasi transmigrasi lain yang memiliki kondisi

lahan kering, pola akses terbatas, dan kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian. Ada beberapa komponen yang bisa ditransfer langsung.

Pertama, pendekatan klaster agroindustri kemiri. Struktur ini bisa diterapkan di gampong lain yang memiliki komoditas unggulan serupa atau komoditas alternatif dengan karakteristik mirip. Paket teknis pengembangan kebun, standar panen, dan desain fasilitas pengolahan awal dapat direplikasi sebagai satu modul.

Kedua, penataan infrastruktur pertanian dan konektivitas kawasan. Studi Seulimeum menunjukkan bahwa jalan usaha tani, akses ke permukiman, dan jaringan pendukung pengangkutan adalah prasyarat agar kawasan layak dihuni dan produktif. Gampong lain dapat menyalin urutan pembangunan ini mulai dari akses primer, kemudian layanan air dan pascapanen agar pengembangan kawasan tidak mandek seperti kasus ketidakterhunan sebelumnya.

Ketiga, penguatan tata kelola dan rantai nilai. Mekanisme pembentukan kelompok tani, koperasi, serta skema kemitraan dengan pembeli dapat direplikasi sebagai model organisasi produksi yang sederhana tapi efektif. Wilayah replikasi bisa memulai dengan pendampingan kelembagaan, lalu masuk ke pengorganisasian rantai nilai saat infrastruktur dasar sudah siap.

Keempat, integrasi mitigasi risiko hidrometeorologi. Kajian sumber air, sistem drainase lahan kering, dan pola adaptasi musim dapat dipakai ulang sebagai template. Pendekatan ini membantu kawasan lain mengurangi kegagalan produksi dan meningkatkan daya tahan ekonomi sebelum masuk tahap hilirisasi.

Dengan struktur replikasi seperti ini, gampong-gampong transmigrasi lain dapat mengadopsi model Seulimeum tanpa memulai dari nol. Mereka cukup menyesuaikan komoditas, kondisi akses, dan kapasitas sosial setempat, sementara kerangka pengembangan kawasannya tetap sama.

4. KESIMPULAN

Evaluasi Kawasan Transmigrasi Seulimeum, khususnya pada UPT Leungah di Mukim Lampanah, menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki potensi sumber daya lahan dan posisi strategis sebagai wilayah hinterland produksi pertanian dan perkebunan. Namun demikian, potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal akibat berbagai

keterbatasan struktural yang saling berkaitan, mulai dari kondisi fisik wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya penguatan kelembagaan, hingga menurunnya fungsi kawasan sebagai ruang permukiman dan aktivitas ekonomi. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa permasalahan kawasan tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat sistemik dan berlapis, di mana keterbatasan akses dan layanan dasar berdampak pada rendahnya minat hunian, stagnasi ekonomi masyarakat, serta melemahnya keberlanjutan sosial dan lingkungan kawasan.

5. REFERENSI

- Farha, I. (2025, April 30). *Warga Leungah Aceh Besar Menderita Tiap Musim Hujan, Sungai Butuh Normalisasi*. From AJNN: <https://www.ajnn.net/news/warga-leungah-aceh-besar-menderita-tiap-musim-hujan-sungai-butuh-normalisasi/index.html>
- Hasyim. (2020, November 23). *Tiga Kecamatan Rawan Longsor*. From Serambinews.com: <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/23/tiga-kecamatan-rawan-longsor>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018). Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi Seulimeum.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (2013). Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012–2032.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar & Pemerintah Kabupaten Pidie. (2017). Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Seulimeum–Muara Tiga Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025–2045.
- Safrina. (2023, January 23). *Hujan Deras Mengguyur Aceh Besar Mengakibatkan Terjadinya Luapan Krueng Leungah*. From Pemerintah Aceh: <https://acehprov.go.id/berita/kategori/sosial-kemasyarakatan/hujan-deras-mengguyur-aceh-besar-mengakibatkan-terjadinya-luapan-krueng-leungah>
- Setyadi, A. (2020, January 29). *1.593 Hektare Sawah di Aceh Besar Kekeringan*. From detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4877517/1-593-hektare-sawah-di-aceh-besar-kekeringan>
- Warsidi, A. (2013, January 3). *Banjir Melanda Aceh Besar*. From TEMPO: <https://www.tempo.co/arsip/banjir-melanda-aceh-besar-1636571>
- Zamzami, F. (2015, January 15). *Jembatan Leungah Putus Diterjang Banjir*. From Serambinews.com: <https://aceh.tribunnews.com/2015/01/15/jembatan-leungah-putus-diterjang-banjir>